

TESIS

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
KARENA PEWARISAN PADA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PADANG**



**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**NASTA OKTAVIAN
NIM 1520122012**

Dosen :

Pembimbing I : Dr.H. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

(Nasta Oktavian, 1520122012, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Andalas Padang, 2018, 140 halaman)

ABSTRAK

Setiap peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan wajib dilengkapi syarat bukti sebagai ahli waris. Dalam aturan hukum masih terjadi diskriminasi pada pembuatan surat keterangan hak mewaris (SKW), yaitu berupa penggolongan penduduk berdasarkan aturan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah dan sebagai upaya untuk menghapus perbedaan golongan penduduk dalam proses pendaftaran tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Dari uraian tersebut muncul permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Tionghoa di Kota Padang? (2) Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Timur Asing Non-Tionghoa (Arab, India dan lain-lain) di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Dari hasil penelitian terhadap kedua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang terhadap penduduk golongan WNI keturunan asing cenderung sangat lama dan prosesnya lebih rumit dibandingkan bagi WNI asli (pribumi). Bagi WNI keturunan Tionghoa harus ada Keterangan Waris dari Notaris dan bagi WNI keturunan Timur Asing selain Tionghoa harus ada Keterangan Waris dari di Balai Harta Peninggalan (BHP). Perbedaan perlakuan bagi WNI asli dan WNI golongan asing dalam pendaftaran Hak atas Tanah ini jelas tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia khususnya golongan asing karena terjadinya diskriminasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kata kunci: Pendaftaran Hak Atas Tanah, Pewarisan, surat keterangan hak waris.

IMPLEMENTATION OF REGISTRATION INHERITAGE FOR THE TRANSFER OF RIGHTS OVER LAND AT PADANG LAND AFFAIRS AGENCY

(Nasta Oktavian, 1520122012, Master of Notarial Law Postgraduate Program Faculty of Law University of Andalas Padang, 2018, 140 pages)

ABSTRACT

Any transfer of rights or registration of rights due to inheritance shall be completed with the provision of evidence as an heir. There is still discrimination in the rule of law, especially on making of the inheritance rights certificate (SKW), such as the classification of population based on Article 111 paragraph (1) letter c point 4 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Affairs Agency Number 3 of 1997 on Implementation of Regulation Government Number 24 of 1997 on Land Registration. The purpose of this study is to determine the implementation of land registration and as an attempt to eliminate differences of population groups in land registration process due to inheritance at Padang Land Registry Office. The problems that occur from the description are: (1) How does the registration process of the transfer of rights over land due to inheritance in the marriage between indigenous and Chinese in Padang City? (2) How does the registration process of the transfer of rights over land due to inheritance in the marriage between indigenous and non-Chinese Foreigners (Arab, India and others) in Padang City. This research uses empirical juridical approach method, which is a method that examines secondary data and continued by conducting primary data research in the field. The research result indicates that the registration process of the transfer of rights over land due to inheritance against citizens of foreign descent tend to be very long and the process is more complicated than for indigenous citizen. For citizens of Chinese descent there must be a Statement of Inheritance from Notary and for non-Chinese Foreigners there must be a Description of Inheritance from the Heritage Hall (BHP). Discrimination against the original citizen and foreign citizen in registration of land rights clearly do not provide a sense of justice and legal certainty for Indonesian citizens, especially for citizens of foreign descent because discrimination is not in accordance with Article 2 in conjunction with Article 4 of Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship and Article 3 of Law Number 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

Keywords: Registration, Transfer of Rights, Inheritance Rights Certificate